

**SKRIPSI**

**Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit *SDGs*  
(Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**GITA GUSRIANTIKA**

**19043093**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. DEVIANI, SE, Ak, M.Si**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**EKPLORASI TANTANGAN BPK TERKAIT AUDIT *SDGs***

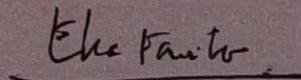
**(Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)**

**Nama** : Gita Gusriantika  
**TM/ NIM** : 2019/19043093  
**Jenjang Pendidikan** : Strata 1 (S1)  
**Departemen** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

**Padang, Juni 2024**

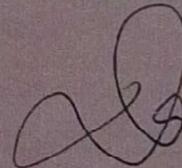
**Disetujui oleh :**

**Ketua Departemen Akuntansi**



**Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19710522 200003 2 001**

**Pembimbing**



**Dr. Deviani, SE, Ak, M. Si**  
**NIP. 19690610 199802 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

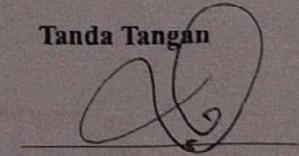
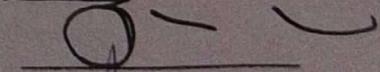
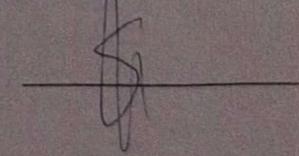
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang*

**EKPLORASI TANTANGAN BPK TERKAIT AUDIT SDGs**

**(Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)**

**Nama** : Gita Gusriantika  
**TM/NIM** : 2019/19043093  
**Departemen** : Akuntansi  
**Jenjang Pendidikan** : Strata 1 (S1)  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

**Padang, Juni 2024**

No	Jabatan	Tim Penguji		Tanda Tangan
			Nama	
1.	Ketua	Dr. Deviani, SE, Ak, M. Si		
2.	Anggota	Prof. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak, CA		
3.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M. Si		

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gita Gusriantika  
NIM/Tahun Masuk : 19043093/2019  
Tempat/Tgl Lahir : Padang Belimbing/25 Agustus 2000  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Beringin, Jorong Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kec.  
X Koto Singkarak, Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat.  
No. Hp : 0822 1075 6577  
Judul Skripsi : Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit *SDGs* (Studi Kasus BPK  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Juni 2024



menyatakan,

Gita Gusriantika  
NIM. 19043093

## ABSTRAK

**Gusriantika, Gita. (19043093/2019). Ekplorasi Tantangan BPK Terkait Audit  
*SDGs (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat).***

**Pembimbing : Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lembaga pemeriksa tertinggi di Sumatera Barat (BPK) menerapkan berbagai strategi dalam mengaudit implementasi SDGs dan tantangan yang dihadapi (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian fenomenologi. Penelitian ini melihat dan mendengarkan secara lebih dekat dan detail penjelasan dan pemahaman individu terhadap pengalamannya serta menggali makna melalui eksplorasi pengalaman subjek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan auditor BPK Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa auditor BPK telah memahami potensi tantangan yang ada, namun belum mampu memaksimalkan kinerja audit SDGs khususnya di bidang kemiskinan. Peneliti melakukan penelitian di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dimana pada wilayah tersebut penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru. Penelitian ini mempunyai kontribusi yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat memperhatikan strategi dalam mengaudit pelaksanaan SDGs khususnya di bidang kemiskinan.

**Kata Kunci : Audit, SDGs, Auditor BPK, Tantangan, Peluang.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit *SDGs (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Dengan terealisasinya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, kasih sayang, semangat, dorongan dan pengorbanan disetiap hela nafas dan tetesan keringat yang dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkan penulis. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan terhormat kepada kedua orang tua penulis, mama tercinta Ibu Dawarti, terimakasih telah menjadi ibu yang paling hebat dan kuat yang penulis banggakan, pengertian, sabar, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menerima semua perilaku dan sikap penulis, serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada papa tercinta, Alm.

Bapak Sukri Dariaco, terimakasih telah menjadi ayah yang paling kuat, tabah, selalu menyayangi dan mencintai dengan caranya sendiri, terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, walaupun tidak dapat menemani penulis semasa pengerjaan skripsi ini, dan tidak dapat menunggu penulis hingga wisuda, namun penulis selalu merasakan kehadiran papa dan penulis yakin papa pasti bangga pada penulis.

2. Kepada adik-adik penulis, Fhiki Adritiska, Rianti Oktafhiza terimakasih telah memberikan support yang begitu besar dan tak ada habisnya kepada penulis. Juga keluarga besar yang selalu memberikan dukungan mental maupun hal lain, terimakasih yang sebesar-besarnya.
3. Ibu Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa membantu, memotivasi, memberikan saran dan selalu sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis yang senantiasa membantu penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak, CA dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Prengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada periode sebelumnya.

8. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang periode sekarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama masa pendidikan.
10. Kepada sahabat satu perjuangan Monica Fitrienedi Jamel, Denisyah Azhura, Elvitra Faradea Tyasa, Aisha Nabila Abdi, dan, Aditya Harry Pratama yang saling memberikan motivasi, saran, berbagai pengetahuan, dan bertukar informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang selama ini, terimakasih karena tidak menyerah, terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat meskipun begitu banyak rintangan yang dilalui, terimakasih.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan akan menjadi pahala dan mendapat balasan berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Padang, Juni 2024

Penulis

Gita Gusriantika

NIM : 19043093

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Teori .....	16
1. Sustainable Development Goals (SDGs) .....	19
2. Dampak Audit <i>SDG</i> terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi <i>SDG</i> .....	19
3. Tantangan dan Kesempatan Audit <i>SDG</i> .....	21
4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan .....	29
5. Kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait dengan SDGs.....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	48
A. Pemilihan Metode Penelitian .....	48
B. Objek Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengambilan Data .....	52
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	56
E. Keabsahan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Transkrip Hasil Penelitian.....	63
<b>BAB IV</b> .....	64
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	64
1. Gambaran Umum.....	64
2. Visi dan Misi .....	66
B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
1. Profil Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat .....	67
2. Visi Misi Auditor BPK.....	69
C. Pembahasan .....	69

1. Keterbatasan dan Tantangan yang dihadapi Auditor Dilihat dari Sudut Pandang Kelembagaan BPK .....	70
2. Upaya Auditor BPK dalam Mengevaluasi Permasalahan dan Kepedulian Terhadap Pendidikan Profesional Bagi Seorang Auditor dilihat dari segi Teknis.....	75
3. Tantangan Politik dan Kesempatan Auditor dalam Mengatasi Tantangan yang Terjadi.....	80
4. Menanggapi Audit SDG dengan menggunakan Komunikasi yang Lebih Baik .....	83
5. Kolaborasi Antara Pemangku Kepentingan dan BPK dalam Menuntaskan Tantangan Yang Ada.....	86
<b>BAB V</b> .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Keterbatasan Penelitian.....	93
C. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN</b> .....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB .....	17
Tabel 2. 2 Potensi Tantangan Audit Sdgs Yang Dilakukan Oleh BPK Berdasarkan Kriteria Standar.....	27
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 3. 1 Data-Data Informan.....	51
Tabel 3. 2 Indikator Yang Dihadapi Audit SDGs .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 17 SDGs .....	16
Gambar 2. 2 Mekanisme dampak audit BPK terkait SDG.....	20
Gambar 4. 1 Peta Kota Padang Sumatera Barat .....	64

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.....	99
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	102
Lampiran 3 Struktur Kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.	129
Lampiran 4 Dokumentasi.....	134

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PBB meluncurkan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan utama pembangunan dan mengurangi kemiskinan secara global pada tahun 2015. Meskipun sebagian tujuan tersebut telah tercapai, dalam “agenda pembangunan pasca-2015”, PBB mengumumkan 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan kalimat *leave no-one behind* (Cordery, 2022). Seperti *MDGs* sebelumnya, 193 negara anggota PBB berjanji untuk mencapai *SDGs* pada tahun 2030 (PBB M. U., 2015) untuk menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan serta melakukan hal tersebut dengan memberikan suara kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Tahun 2015, negara-negara anggota PBB mengadopsi agenda 2030, yang mencakup *Sustainable Development Goals (SDGs)* (PBB M. U., 2015). Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda *SDGs* sebagai kesepakatan pembangunan global.

*SDGs* merupakan serangkaian 17 tujuan dengan 169 target, yang mencakup seluruh isu pembangunan berkelanjutan yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016-2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan-tujuan ini bersifat universal yang berlaku untuk semua negara, apapun kondisinya, sehingga seluruh

negara tanpa kecuali memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target *SDGs*.

Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals (MDGs)*, *SDGs* ini dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, *Civil Society Organization*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Inti dari *SDGs* adalah *leave no-one behind* (tidak meninggalkan siapapun). Dengan prinsip tersebut, *SDGs* harus mampu mengatasi dua aspek utama; keadilan prosedural, yang menunjukkan sejauh mana semua pihak terutama yang sebelumnya tertinggal dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan; dan keadilan substansial, yang menyoroti seberapa efektif kebijakan dan program pembangunan dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, terutama kelompok-kelompok yang tertinggal.

Abhayawansa (2021), mengkonfirmasi tantangan dalam mengembangkan strategi *SDG*, dengan menyatakan bahwa “proses akuntabilitas pemerintah sangat penting dalam implementasi *SDGs* secara nasional”. Sistem akuntabilitas nasional untuk *SDGs* akan sangat beragam dan melibatkan aktor yang berbeda-beda (Karlsson-Vinkhuyzen, 2018). Penelitian akuntansi untuk pembangunan berkelanjutan berupaya menjelaskan peran akuntansi dalam mengatasi tantangan sosial dan ekologi yang dihadapi umat manusia (Bebington, 2017). Dengan demikian, akuntansi dapat diterapkan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat melihat dan memahami dunia dengan cara yang memungkinkan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan (Cuckston, 2018).

Lembaga audit tertinggi (SAI) menjalankan fungsi sentral dalam system akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini, lembaga audit tertinggi di Indonesia yaitu BPK. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintah (Titworth, 2006). BPK dengan mandat, independensi, dan kapasitas yang sesuai menghasilkan informasi dan evaluasi yang relevan mengenai kekuatan & keterbatasan lembaga, proses dan kebijakan pemerintah. Sobkowiak (2020), memberikan wawasan terkait akuntansi pemerintah (tingkat nasional) dan akuntabilitas kinerja terhadap indikator-indikator spesifik yang mendukung pencapaian target dalam satu *SDG*, wawasan mereka mengenai kerangka ruang-ruang yang dapat dihitung terkait *SDGs* kemungkinan akan berguna dalam memahami bagaimana organisasi dapat mengembangkan perhitungan terkait *SDGs* yang efektif.

Untuk mendukung agenda 2030, BPK berpotensi memainkan peran penting dalam membangun akuntabilitas *SDGs* ( (Montero, 2019) :

1. Membentuk lembaga akuntabilitas domestik dengan mandat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah nasional.
2. Berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah dengan memberikan informasi kepada sistem pemantauan dan evaluasi nasional yang melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas kebijakan dan program terkait *SDGs* (Karlsson-Vinkhuyzen, 2018).

3. Memberikan informasi baru yang tidak tersedia melalui sistem tindak lanjut dan peninjauan *SDG* dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan implementasi.
4. Memungkinkan peran masyarakat dalam memantau implementasi *SDG*.

Peran BPK dalam mengaudit *SDGs* harus dipahami dalam konteks ini. Sebagai lembaga akuntabilitas nasional mereka dapat menggunakan mandat formal untuk mengawasi dan menilai upaya pemerintah dalam melaksanakan *SDGs*, melengkapi lembaga dan aktor akuntabilitas lainnya, misalnya parlemen, masyarakat sipil, dan media) serta sistem pemantauan dan evaluasi internal pemerintah. Upaya-upaya ini sebagian besar berasal dari komitmen yang kuat dari asosiasi lembaga audit tertinggi internasional (INTOSAI) terhadap *SDGs*, dan upaya terkoordinasi dari *INTOSAI Development Initiative (IDI)*, yang sejak tahun 2016 telah mendukung lebih dari 80 lembaga audit tertinggi dari seluruh daerah untuk melakukan audit kesiapan implementasi *SDG*.

Fenomena yang dapat dilihat dari beberapa artikel sebelumnya yaitu ditemukan akuntansi belum siap dalam menghadapi *SDGs* dan belum banyak yang melakukan penelitian terkait *SDGs* maupun audit *SDGs* (Bebbington, 2020; Bebbington, 2017). Bebbington (2020), menemukan bahwa meskipun *SDGs* menonjol dalam dunia kebijakan dan kegunaannya dalam membentuk pemahaman tentang tanggung jawab organisasi, para pakar akuntansi masih kurang terlibat dalam penelitian yang bermotif *SDGs*. Hal ini menimbulkan dua permasalahan. Pertama, ilmu akuntansi kurang

tersedia dalam jaringan pengetahuan yang sedang dikembangkan tentang bagaimana mewujudkan ambisi *SDGs*. Kedua, ilmu akuntansi tidak berkembang dengan cara yang mencakup tantangan terkait *SDGs* yang dihadapi organisasi. Penelitian akuntansi mengenai *SDGs* berada pada tahap awal pengembangan, meskipun hampir beberapa tahun telah berlalu sejak penerapan resminya serta relatif sedikit penelitian yang pada saat itu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan serangkaian penelitian inovatif mengenai peran dan potensi akuntansi dalam kaitannya dengan *SDGs*. Bebbington (2017), juga menemukan bahwa *SDGs* ini adalah makalah pertama yang mengeksplorasi peran akuntansi akademis dalam memajukan pencapaian *SDGs* melalui peningkatan pemahaman, kritik dan kemajuan kebijakan, praktik dan teori akuntansi. Ini juga merupakan makalah pertama yang mengusulkan agenda penelitian di bidang ini.

Setelah melakukan survey ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ternyata sejauh ini hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan tujuan *SDGs-1* yaitu tanpa kemiskinan, artinya baru satu audit terkait *SDGs* yang dilakukan yaitu audit *SDG-1* dari 17 *SDG* yang ada. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2023 belum pernah melakukan pemeriksaan khusus *SDGs*. Sejalan ini, BPK Perwakilan melakukan pemeriksaan yang memiliki substansi yang berkaitan dengan *SDGs*, contohnya pemeriksaan atas isu kemiskinan. Pemeriksaan khusus terkait *SDGs* merupakan objek pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara II di BPK Pusat. Di Indonesia, sudah menerapkan 17 *SDGs* dan BPK RI telah melaksanakan

pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan *SDGs*. Pemeriksaan kinerja BPK RI pada semester 1 tahun 2019 atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian *SDGs*. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator. *SDGs* yang sesuai dengan tema VNR 2019 yaitu SDG tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17 ( [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) ).

Saat ini, salah satu isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016 – 2021 adalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan masih adanya daerah tertinggal. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (Maret) di mana persentase penduduk miskin tahun 2016 (September) sebesar 7,14%, turun menjadi 6,28% pada tahun 2020 (Maret). Namun, angka tersebut kembali meningkat pada akhir tahun 2020 hingga maret tahun 2021 yang mencapai 6,63%. Sedangkan target tingkat kemiskinan Sumatera Barat tahun 2021 dalam RPJMD 2016–2021 adalah sebesar 5,09 dan sebesar 6,40% (outlook) pada RPJMD 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Bappeda atas target sasaran pengurangan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional tahun 2021 (September) adalah 9,71%.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat**

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Sumatera Barat	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67
2	Kab. Kepulauan Mentawai	12,95	12,99	13,22	13,37	14,31
3	Kab. Pesisir Selatan	35,53	34,92	36,51	35,46	37,41
4	Kab. Solok	33,33	32,89	29,74	29,28	30,36
5	Kab. Sijunjung	16,83	16,55	16,65	16,28	16,81
6	Kab. Tanah Datar	19,27	18,48	16,20	15,34	15,89
7	Kab. Padang Pariaman	34,70	33,20	29,48	28,98	30,41
8	Kab. Agam	36,57	32,92	33,10	33,31	34,26
9	Kab. Lima Puluh Kota	26,93	26,47	26,64	26,43	28,51
10	Kab. Pasaman	20,38	20,31	20,22	20,29	21,57
11	Kab. Solok Selatan	11,89	11,85	12,49	12,39	13,41
12	Kab. Dharmasraya	15,63	15,42	15,49	15,70	17,60
13	Kab. Pasaman Barat	30,84	31,83	31,53	31,64	34,97
14	Kota Padang	43,75	44,04	42,44	42,17	48,44
15	Kota Solok	2,50	2,29	2,29	1,99	2,31
16	Kota Sawahlunto	1,23	1,48	1,35	1,36	1,52
17	Kota Padang Panjang	3,22	3,11	3,00	2,84	3,28
18	Kota Bukittinggi	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98
19	Kota Payakumbuh	7,72	7,69	7,68	7,74	8,66
20	Kota Pariaman	4,49	4,40	4,20	3,66	3,99

*Sumber : BPK Sumatera Barat 2023*

Data di atas menunjukkan informasi-informasi berikut, dimana persentase penduduk miskin di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin tingkat nasional. Persentase penduduk miskin

perkotaan pada tahun 2021 sebesar 4,83 persen, sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada tahun 2021 sebesar 7,23 persen (per september 2021). Selain itu jumlah rata-rata penduduk miskin terbanyak berada pada Kota Padang sebanyak 48,44 ribu jiwa dan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 37,41 ribu jiwa; dan rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84% dan Kabupaten Solok sebesar 8,01%.

Dalam hal kesiapan BPK melakukan pemeriksaan *SDGs* tersebut, BPK menerapkan model pemeriksaan dari INTOSAI Development Initiative's (IDI) Model Audit *SDGs* (ISAM) yang merupakan suatu pendekatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan *SDGs* saat merancang proses pemeriksaan. Dalam masa proses audit, BPK melaksanakan pemeriksaan, tanggung jawab pemeriksa mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervise (Pernyataan Standar Pemeriksaan 200). BPK melakukan dua pendekatan terkait *SDGs*, yakni pendekatan *dedicated* dan *embedded*. *Dedicated* merupakan pemeriksaan yang spesifik pada target pencapaian *SDGs*, sebagai suatu bentuk evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kebijakan yang berperan dalam mencapai sasaran nasional atau lokal yang terkait dengan satu atau lebih tujuan *SDGs*. Sedangkan *embedded* merujuk pada pemeriksaan yang terintegrasi dengan sudut pandang *SDGs*, dimana pemeriksaan tersebut secara bersamaan terhubung dengan pemeriksaan lainnya. Ini mencakup langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan serta metode pemeriksaan yang dipertimbangkan dalam konteks pemeriksaan terkait *SDGs*. Bentuk

lain yang dilakukan oleh BPK adalah dengan melaksanakan reviu VNR (*Voluntary National Reviews*), mempublikasikan laporan keberlanjutan, menginisiasi berdirinya SAI20, dan membentuk Unit Sentral Koordinasi *SDGs* (Survey BPK).

Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang berkomitmen menjalankan TPB/*SDGs*, juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/*SDGs*, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD). Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/*SDGs* pada Goals 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/*SDGs* (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan.

Selain itu, pembiayaan inovatif juga dapat dikembangkan untuk pembiayaan TPB/*SDGs*, misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi). Terkait dengan hal tersebut, salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian tujuan/goal 9 TPB/SDGs yaitu: Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan serta konservasi energi yang mendukung pencapaian tujuan/goal 7 yaitu Energi Bersih dan Terbarukan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan 1 (yang disebut *SDG 1*), tanpa kemiskinan, sebagai tantangan mendasar pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, jika penelitian akuntansi ingin berkontribusi terhadap pencapaian *SDGs* (Bebbington., 2018), maka penting untuk memahami bagaimana pemerintah nasional berupaya memperhitungkan kinerja mereka dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. Hal ini termasuk menjadikan tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan dapat diperhitungkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perumusan strategi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini (Thompson, 2023). Agar tantangan pembangunan berkelanjutan dapat diperhitungkan, pemerintah nasional harus mengidentifikasi tujuan pemerintahannya dan mendefinisikan bagaimana kinerjanya dalam kaitannya dengan tujuan tersebut harus dipahami dan diukur.

Riset terdahulu dilakukan di Costa Rica yang telah melakukan audit terhadap pengentasan kemiskinan (*SDG 1*) (Costa Rica SAI, 2018). Lembaga Audit Tertinggi Costa Rica, berkoordinasi dengan Inisiatif Pengembangan (IDI) Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi (INTOSAI), melaksanakan audit kinerja pada

tahun 2016 untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi “*Bridge to Development (BTD)*”, sebuah strategi nasional yang dirancang untuk merawat keluarga-keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrem. Dengan meningkatnya penekanan pada audit implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*, audit terkoordinasi ini lebih dari sebelumnya, memiliki arti penting karena membahas *SDG 1: Tanpa Kemiskinan*. (Costa Rica SAI, 2018). Di Georgia dan Indonesia, BPK mengembangkan portal online untuk menyediakan informasi mengenai *SDGs* dan menyebarkan hasil audit *SDG*. Secara internal, BPK telah menyelaraskan rencana kerja mereka dengan jadwal tinjauan global (misalnya Indonesia) dan menunjuk unit organisasi dan tim untuk melaksanakan serta mengerjakan audit terkait *SDG* (misalnya Brasil, Indonesia) (Guillan Montero dkk., 2019).

Berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, tujuan pertama *SDGs* dari 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah tanpa kemiskinan dalam segala bentuknya. *SDG – 1* bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun yang berarti fokus pada pemberantasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh serta memperhatikan faktor-faktor penentu lainnya yang mempengaruhi kemiskinan seperti faktor sosio-ekonomi, faktor budaya, politik dan lingkungan. Sasaran 1 juga bertujuan untuk mengurangi, setidaknya setengahnya, proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensinya menurut definisi nasional. Lebih lanjut, hal ini menekankan pada penciptaan kerangka kebijakan yang baik, mobilisasi sumber

daya dari berbagai sumber dan penerapan sistem perlindungan sosial yang sesuai secara nasional (Kritshaurya Bhambu, 2020). Di Indonesia, upaya mencapai sasaran tersebut didukung oleh kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mengadopsi dua strategi kunci. Pertama, mengurangi beban pengeluaran dengan memperluas bantuan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan melalui program ekonomi yang produktif (LHP BPK Sumatera Barat).

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar ini mengamanatkan BPK untuk merencanakan dan menjalankan pemeriksaan dengan tujuan mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai kinerja entitas. BPK percaya bahwa pemeriksaan tersebut memberikan landasan yang memadai untuk mengidentifikasi temuan pemeriksaan, serta menyusun simpulan dan rekomendasi. Untuk itu, dalam rangka memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan, BPK melakukan wawancara, review dokumen, kuesioner, analisis prosedur, analisis hasil, analisis kuantitatif, observasi lapangan, *walkthrough*, konfirmasi instansi/pihak terkait, dan uji petik atas dokumen terkait program penanggulangan kemiskinan (LHP BPK Sumatera Barat).

Tantangan itu karena para auditor BPK berlatar belakang sebagai auditor laporan keuangan. Audit kinerja bisa serupa dengan audit keuangan. Akan tetapi, sejatinya ada perbedaan dalam hal persyaratan audit hingga keterampilan yang

dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja secara efektif. Tantangan lain BPK adalah mengenai jangka waktu pemeriksaan. Dengan keterbatasan itu, kita harus menghasilkan audit yang bernilai dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat serta berdampak.

Alasan pemeriksaan *SDGs* yang dilakukan BPK karena Renstra (Rencana Strategis) BPK Tahun 2020-2024 menjabarkan proses penyelarasan topik pemeriksaan dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 dilakukan dengan mempertimbangkan implementasi agenda *SDGs* pada masing-masing agenda pembangunan. Untuk meningkatkan dan memperkuat kemitraan dengan semua pemangku kepentingan *SDGs* di Indonesia dengan mengadakan suatu akuntabilitas yang mengupayakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pencapaian kegiatan *SDGs* dan kinerja para pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Untuk itu peningkatan akuntabilitas dapat membantu perbaikan tata kelola menjadi hal penting dalam pencapaian *SDGs*.

Beberapa daerah di Indonesia menginginkan *SDGs* sendiri menjadi prioritas pembangunan daerah, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK melakukan

Pemeriksaan Kinerja terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah kemiskinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan hasil observasi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dengan judul **“Eksplorasi Tantangan BPK Terkait Audit *SDGs* (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga audit tertinggi Sumatera Barat (BPK) menerapkan strategi untuk mengaudit implementasi *SDGs* dan tantangan yang mereka hadapi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana lembaga audit tertinggi Sumatera Barat (BPK) menerapkan berbagai strategi untuk mengaudit implementasi *SDGs* dan tantangan yang mereka hadapi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga ilmu mengenai Tantangan dan Kesempatan Terkait dengan audit *SDGs*. Serta dapat memberikan tambahan informasi dan referensi pada penelitian di bidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil pemeriksaan audit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh pemahaman bagi pihak yang bergelut dalam dunia pendidikan dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak BPK RI khususnya auditor agar melaksanakan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan prosedur dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang telah ditetapkan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk senantiasa memperhatikan strategi dalam mengaudit implementasi *SDGs* dan tantangan yang dihadapi, serta menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.